



RABU, 8 AGUSTUS 2018

SUMBER BERITA

	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
X	RADAR BENGKULU

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF NETRAL BAHAN PEMERIKSAAN PERHATIAN KHUSUS

Kejati Pastikan Sidik Kasus TPP Seluma

RBI, BENGKULU - Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Bengkulu, Baginda Polin Lumban Gaol SH, MH melalui Asisten Pidana Khusus (Aspidsus), Hendri Nainggolan SH, MH mengungkapkan, untuk perkara dugaan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) pada Pemerintah Daerah (Pemda) kabupaten Seluma, hingga saat ini masih dalam proses pengumpulan barang bukti dan keterangan (purbaket). Dan ia memastikan perkara pengucuran TPP yang berbaur atau diduga telah merugikan negara mencapai Rp 12 Miliar tersebut naik ke Penyidikan, setelah perkara pada Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Bengkulu Tengah (Benteng) selesai.

"Kita menangani perkara ini satu satu. Sekarang ini kita penyidika masih fokus melakukan penyidikan kasus perjalanan fiktif pada Setda Kabupaten Benteng. Kemungkinan besar dalam waktu dekat ini sudah ditemukan siapa yang harus bertanggung jawab dalam perkara terse-

but, setelah itu nantinya baru kita mulai fokus ke Seluma. Sekarang ini kita selesaikan satu satu dulu," jelasnya Selasa, (7/8).

Dikatakan Hendri, hingga saat ini berbagai upaya pengumpulan alat bukti sebagai pendukung penanganan perkara tersebut terus dilakukan. Salah satunya yaitu, tim sudah berkoordinasi dengan biro hukum Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk mempertanyakan masalah pengucuran dana TPP yang diduga tidak sesuai dengan aturannya tersebut.

"Pencarian alat bukti pendukung terus kita lakukan. Dan kita juga menargetkan dari proses penyelidikan, perkara ini segera bisa naik ke Penyidikan, dan menetapkan orang yang harus bertanggung jawab dalam masalah pengucuran TPP tersebut. Intinya kita tidak berhenti bagaimanapun proses penyeidikannya terus kita lakukan. Kalau sudah cukup alat bukti nantinya kita pastikan perkara tersebut naik ke Penyidikan,"

kata Hendri. Untuk diketahui, selama proses Penyelidikan penyidik Kejati Bengkulu, sudah memanggil beberapa orang pejabat di Lingkup Pemda Kabupaten Seluma yang dianggap mengetahui masalah pembayaran besaran TPP tersebut. Diantaranya yang sudah dimintai keterangan yaitu, Asisten I Pemda Kabupaten Seluma, Kabid DPPKAD pada Pemda Kabupaten Seluma. Diketahui juga, Perkara yang diduga merugikan negara ini dibidik Kejati setelah menerima laporan dari masyarakat, bahwa anggaran untuk TPPP di Kabupaten Seluma untuk satu tahun sebesar Rp 50 Miliar. Besaran TPP tersebut diduga tidak sesuai dengan beban kerja ASN pada Pemda Kabupaten Seluma. Hasil Penyelidikan sementara ini rincian besaran pembayaran TPP itu, untuk pejabat sekelas Kabid dan Kabag menerima Rp 16 Juta hingga Rp 12 Juta per bulan, dengan besaran pembayaran itu, kuat dugaan tidak ada dasar dan dan menyalahi aturan.(ide)